



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 57 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15)

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri C
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri C,
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 19);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 - 2015 (lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri C);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 3 Seri C);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 4 Seri C);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 33);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 6 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 34);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 7 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 35);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 8 Seri C);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 9 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 36);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 10 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 37);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 39);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 1.090.575.714.494,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.449.353.251.627,00
c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah	<u>Rp. 822.465.995.251,00</u>
Jumlah pendapatan	Rp. 3.362.394.961.372,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 1.564.212.189.006,00
2) Belanja Hibah	Rp. 127.135.630.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 55.337.353.560,00
4) Belanja Bagi Hasil	Rp. 82.987.173.776,00
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 192.201.518.952,00
6) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>
Jumlah belanja tidak langsung	Rp. 2.024.873.865.294,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 64.415.396.883,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 786.585.323.054,00
3) Belanja Modal	<u>Rp. 815.006.630.444,00</u>
	Rp. 1.666.007.350.381,00
Jumlah Belanja	Rp. 3.690.881.215.675,00
Surplus/(defisit)	Rp. 328.486.254.303,001

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp. 340.386.254.303,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 11.900.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp. 328.486.254.303,00</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sidoarjo

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang - undanga

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo
Ditetapkan di Sidoarjo

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Desember 2014

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 22 Desember 2014

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINO RUDY MUNTIWAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR: 57 Tahun 2014

TANGGAL: 22 Desember 2014

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

Nomor Unit	Uraian	Jumlah
1	2	3
1 .	PENDAPATAN DAERAH	3.362.394.961.372.00
1 . 1 .	Pendapatan Asli Daerah	1.090.575.714.494.00
1 . 1 . 1 .	Hasil Pajak Daerah	656.653.998.860.00
1 . 1 . 1 . 1	Pajak Hotel	9.500.000.000.00
1 . 1 . 1 . 1.1	Hotel Bintang Tiga	4.935.644.753.00
1 . 1 . 1 . 1.2	Hotel Bintang Dua	2.194.283.884,00
1 . 1 . 1 . 1.3	Hotel Melati Tiga	1.964.157.778.00
1 . 1 . 1 . 1.4	Cottage	46.226.949.00
1 . 1 . 1 . 1.5	Losmert/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	323.206.911.00
1 . 1 . 1 . 1.6	Wisma Pariwisata	36.479.725,00
1 . 1 . 1 . 2 .	Pajak Restoran	37.000.000.000.00
1 . 1 . 1 . 2.1	Restoran	16.979.543.940.00
1 . 1 . 1 . 2.2	Rumah Makan	3.598.462.368.00
1 . 1 . 1 . 2.3	Cafe	5.676.893.386.00
1 . 1 . 1 . 2.4	Kantin	141.332.447.00
1 . 1 . 1 . 2.5	Katering	8.973.893.951.00
1 . 1 . 1 . 2.6	Waning	1.629.873.908.00
1 . 1 . 1 . 3 .	Pajak Hiburan	3.000.000.000.00
1 . 1 . 1 . 3.1	Tontonan Film/Bioskop	211.446.875,00
1 . 1 . 1 . 3.2	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	10.187.500,00
1 . 1 . 1 . 3.3	Karaoke	1.065.047.819.00
1 . 1 . 1 . 3.4	Permainan Bilyar	11.043.000.00
1 . 1 . 1 . 3.5	Balap Kerdaraan Bermotor	5.651.786,00
1 . 1 . 1 . 3.6	Permainan Ketangkasan	1.573.073.469,00
1 . 1 . 1 . 3.7	Panti Pijat/Refleksi	102.177.051.00
1 . 1 . 1 . 3.8	Pertandingan Olahraga	21.372.500,00
1 . 1 . 1 . 4	Pajak Reklame	8.500.000.000.00
1 . 1 . 1 . 4 . 1	Reklame Papan/Bill BoardA/ideotron/Megatron	5.550.300.000,00
1 . 1 . 1 . 4 . 2	Reklame Kain	1.772.000.000,00

1.1.1.4.3	Reklame Metekat/Stiker	12.300.000,00
1.1.1.4.4	Reklame Selebaran	84.700.000,00
1.1.1.4.5	Reklame Berjalan	84.700.000,00
1.1.1.4.6	Reklame Udara	50.000.000,00
1.1.1.4.7	Reklame Baliho (Vinyl / Colibrate)	946.000.000,00
1-1.1.5	Pajak Penerangan Jalan	211.000.000.000,00
1.1.1.5.1	Pajak Penerangan Jalan PLN	199.999.259.100,00
1.1.1.5.2	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	11.000.740.900,00
1.1.1.6	Pajak Parkir	13.000.000.000,00
1.1.1.6.1	Pajak Parkir	13.000.000.000,00
1.1.1.7	Pajak Air Tanah	1.800.000.000,00
1.1.1.7.1	Pajak Air Tanah	1.800.000.000,00
1.1.1.8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	155.000.000.000,00
1.1.1.8.1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	155.000.000.000,00
1.1.1.9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	217.853.998.860,00
1.1.1.9.1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	217.853.998.860,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	97.650.879.460,00
1.1.2.1	Retribusi Jasa Umum	24.962.196.300,00
1.1.2.1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.566.374.200,00
1.1.2.1.2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.143.140.000,00
1.1.2.1.3	Retribusi Pelayanan Pasar	10.512.253.000,00
1.1.2.1.4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.626.567.100,00
1.1.2.1.5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	233.862.000,00
1.1.2.1.6	Retribusi Pengendatian Menara Telekomunikasi	1.880.000.000,00
1.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	34.006.770.160,00
1.1.2.2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.642.830.160,00
1.1.2.2.2	Retribusi Terminal	784.000.000,00
1.1.2.2.3	Retribusi Rumah Potong Hewan	1.486.890.000,00
1.1.2.2.4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.343.050.000,00
1.1.2.2.5	Retribusi Parkir	27.750.000.000,00
1.1.2.3	Retribusi Perizinan Tertentu	38.681.913.000,00
1.1.2.3.1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	26.901.343.000,00
1.1.2.3.2	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	8.700.000.000,00
1.1.2.3.3	Retribusi Izin Trayek	69.570.000,00
1.1.2.3.4	Retribusi Pemeriksaan Hasil asal hewan dan bahan asal hewan	11.000.000,00
1.1.2.3.5	Retribusi Petpanjangan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Keqa Asing)	3.000.000.000,00
1-1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.067.000.000,00
1.1.3.1	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	29.067.000.000,00

1.1.3.1.1	Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta"	6.300.000.000,00
1.1.3.1.2	PD Aneka Usaha	935.000.000,00
1.1.3.1.3	BPR "Delta Artha"	5.800.000.000,00
1.1.3.1.4	Bank Jatim	16.032.000.000,00
1.1.4	Lain-tain Pendapatan Asli Daerah yang San	307.203.836.174,00
1.1.4.1	Penerimaan Jasa Giro	6.750.000.000,00
1.1.4.1.1	Jasa Giro Kas Daerah	6.750.000.000,00
1.1.4.2	Pendapatan Bunga Deposito	14.300.000.000,00
1.1.4.2.1	Rekening Deposito Pada Bank Jatim	11.000.000.000,00
1.1.4.2.2	Rekening Deposito Pada Bank BNI	650.000.000,00
1.1.4.2.3	Rekening Deposito Pada Bank BTN	1.150.000.000,00
1.1.4.2.4	Rekening Deposito Pada Bank BRI	1.500.000.000,00
1.1.4.3	Hasil Pengelolaan Dana Bergultr	465.000.000,00
1.1.4.3.1	Penerimaan dari bunga dana bergulirdari UKM	300.000.000,00
1.1.4.3.2	Penerimaan dari Bunga Dana Bergulirdari pembelian Gabah Petani	126.000.000,00
1.1.4.3.3	Penerimaan dari bunga dana bergulirdari UPPKS	24.000.000,00
1.1.4.3.4	Penerimaan dari Bunga Dana Bergulir dari P3EL	15.000.000,00
1.1.4.4	Pendapatan Dari Sewa Aset Pemda (Rumah/Gedung/Tanah/Lahan)	582.617.342,00
1.1.4.4.1	Pendapatan dari Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	480.000,00
1.1.4.4.2	Pendapatan dari Sewa Gedung/Kantor/Tempat	424.315.800,00
1.1.4.4.3	Pendapatan dari Sewa Tanah/Lahan	110.699.542,00
1.1.4.4.4	Hasil Pengelolaan sewa TKD Kelurahan	47.122.000,00
1.1.4.5	Pendapatan Dari Kesepakatan dan Kerjasama	460.848.832,00
1.1.4.5.1	Pendapatan dari Kontribusi PT. Bumi Citra Properindo	71.500.000,00
1.1.4.5.2	Pendapatan dari Kontribusi PT. Setia Mandiri Mitratama. Tbk. (Putt-putt)	30.848.832,00
1.1.4.5.3	Pendapatan dari Kontribusi PT. Indraco (Suncity Plaza)	150.000.000,00
1.1.4.5.4	Pendapatan dari Pengelolaan Rusunawa Ds. Tambaksawah - Warn	200.000.000,00
1.1.4.5.5	Pendapatan dari Kontribusi Tambak Akademi Perikanan	8.500.000,00
1.1.4.6	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	250.000.000.000,00
1.1.4.6.1	Penerimaan Pendapatan BLUD RSUD	250.000.000.000,00
1.1.4.7	Penjualan Hasil Perikanan	230.750.000,00
1.1.4.7.1	Penjualan Hasil Perikanan	230.750.000,00
1.1.4.8	Penjualan Hasil Raskin	708.000.000,00
1.1.4.8.1	Penjualan Hasil Raskin	708.000.000,00
1.1.4.9	Penjualan Hasil Pasar Murah	202.500.000,00
1.1.4.9.1	Penjualan Hasil Pasar Murah	202.500.000,00
1.1.4.10	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	33.504.120.000,00
1.1.4.10.1	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Canting	544.320.000,00

1. 1 4.10. 2	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sidoarjo	1.118.016.000,00
1. 1 .4.10. 3	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sekardangan	477.936.000,00
1. 1 . 4.10. 4	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Urangagung	520.344.000,00
1. 1 . 4.10. 5	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Buduran	1.270.296.000,00
1. 1 . 4.10. 6	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Candi	1.569.816.000,00
1. 1 . 4.10. 7	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Porong	739.872.000,00
1. 1 .4.10. 8	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kedungsolo	1.056.128.000,00
1. 1 .4.10. 9	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Jabon	1.769.040.000,00
1. 1 .4.10.10	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Krembung	2.159.496.000,00
1. 1 .4.10.11	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tanggulangin	1.238.184.000,00
1. 1 . 4.10.12	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tulangan	1.144.080.000,00
1. 1 . 4.10.13	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kepadangan	766.656.000,00
1. 1 . 4.10.14	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Taman	1.843.632.000,00
1. 1 . 4.10.15	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Trosobo	857.160.000,00
1. 1 . 4.10.16	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Warn	1.454.112.000,00
1. 1 . 4.10.17	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Medaeng	615.168.000,00
1. 1 . 4.10.18	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sedati	1.201.680.000,00
1. 1 . 4.10.19	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Gedangan	697.176.000,00
1. 1 . 4.10.20	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sukodono	1.206.936.000,00
1. 1 . 4.10.21	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Krian	2.078.712.000,00
1. 1 . 4.10.22	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Barengkrajan	850.680.000,00
1. 1 . 4.10.23	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Balongbendo	2.213.208.000,00
1. 1 . 4.10.24	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Wonoayu	1.713.168.000,00
1. 1 . 4.10.25	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tank	2.482.920.000,00
1. 1 . 4.10.26	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Prambon	1.875.384.000,00
1 . 2	Dana Perimbangan	1.449.353.251.627,00
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	208.034.752.627,00
1 . 2.1.1	Bagi Hasil Pajak	132.723.255.627,00
1 . 2.1.1.1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	54.559.701.000,00
1 . 2.1.1.2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 dan PPh Pasal 21	67.509.965.000,00
1 . 2.1.1.3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	10.653.589.627,00
1 . 2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	75.311.497.000,00
1 . 2 . 1 . 2 . 1	Bagi Hasil dari Provrsi Sumber Daya Hutan	270.667.000,00
1 . 2 . 1 . 2 . 2	Bagi Hasil dari luran Eksplorasi dan luran Eksplottasi (Royaiti)	6.502.000,00
1 . 2 . 1 . 2 . 3	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	395.257.000,00
1 . 2 . 1 . 2 . 4	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	72.201.337.000,00
1 . 2 . 1 . 2 . 5	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	2.418.282.000,00
1 . 2 . 1 . 2 . 6	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	19.452.000,00

1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.206.659.789.000,00
1.2.2.1	Dana Alokasi Umum	1.206.659.789.000,00
1.2.2.1.1	Dana Alokasi Umum	1.206.659.789.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	34.658.710.000,00
1.2.3.1	Dana Alokasi Khusus	34.658.710.000,00
1.2.3.1.1	DAK Pendidikan	21.947.130.000,00
1.2.3.1.2	DAK Keluarga Berencana	1.458.630.000,00
1.2.3.1.3	DAK Infrastruktur Air Minum	4.476.970.000,00
1.2.3.1.4	DAK Kelautan dan Perikanan	4.418.140.000,00
1.2.3.1.5	DAK Kehutanan	1.778.180.000,00
1.2.3.1.6	DAK Keselamatan Transportasi Darat	579.660.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	822.465.995.251,00
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya	279.083.982.657,00
1.3.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	277.785.789.110,00
1.3.1.1.1	Bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	83.391.288.578,00
1.3.1.1.2	Bagi hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	97.695.910.168,00
1.3.1.1.3	Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	80.744.659.107,00
1.3.1.1.4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	944.102.184,00
1.3.1.1.5	Bagi Hasil dari Sumbangan Pihak ke III (SP III)	25.328.947,00
1.3.1.1.6	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	14.984.500.126,00
1.3.1.2	Dana Bagi Hasil Retnbusi dari Provinsi	177.354.223,00
1.3.1.2.1	Bagi Hasil Penenmaan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi UTTP dan BDKT	104.354.223,00
1.3.1.2.2	Bagi Hasil Retnbusi Penerimaan Pemenksaan, Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (RP3HH)	73.000.000,00
1.3.1.3	Dana Bagi Hasil Retnbusi dari Kota	1.120.839.324,00
1.3.1.3.1	Dana Bagi Hasil Retnbusi dari Kota Surabaya	1.120.839.324,00
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	452.756.099.594,00
1.3.2.1	Dana Penyesuaian	452.756.099.594,00
1.3.2.1.1	Dana Insentif Daerah	23.082.598.000,00
1.3.2.1.2	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.626.000.000,00
1.3.2.1.3	Tunjangan Profesi Guru PNSD	379.631.707.000,00
1.3.2.1.4	Dana Desa	48.415.794.594,00
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	90.625.913.000,00
1.3.3.1	Bantuan Keuangan Dari Provinsi ...	90.625.913.000,00
1.3.3.1.1	Bantuan Keuangan Pendidikan	11.454.540.000,00
1.3.3.1.2	Bantuan Keuangan Kesehatan	36.121.373.000,00
1.3.3.1.3	Bantuan Keuangan Hari Jadi Provinsi Jawa Ttmur	50.000.000,00
1.3.3.1.4	Bantuan Keuangan Pendukung Infrastruktur	43.000.000.000,00

	Jumlah PENDAPATAN DAERAH	362.394.961.372.00
2.	BELANJA	3.690.881.215.675.00
2. 1.	Belanja Tidak Langsung	2.024.873.865.294,00
2. 1. 1	Belanja Pegawai	1.564.212.189.006.00
2 • 1. 1. 1	Gaji dan Tunjangan	1.338.184.052.118.00
2. 1. 1. 1. 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	703.770.255.114.00
2. 1. 1. 1. 2	Tunjangan Keluarga	66.073.200.000,00
2. 1. 1. 1. 3	Tunjangan Jabatan	11.436.355.000.00
2. 1. 1. 1. 4	Tunjangan Fungsional	66.913.000.000.00
2. 1. 1. 1. 5	Tunjangan Fungsional Umum	14.048.000.000.00
2. 1. 1. 1. 6	Tunjangan Beras	42.283.500.000,00
2. 1. 1. 1. 7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.858.750.000,00
2. 1. 1. 1. 8	Pembulatan Gaji	21.000.000,00
2. 1. 1. 1. 9	Iuran Asuransi Kesehatan	21.247.850.000.00
2. 1. 1. 1. 10	Uang Paket	105.887.500,00
2. 1. 1. 1. 11	Tunjangan Badan Musyawarah	37.984.000.00
2. 1. 1. 1. 12	Tunjangan Kcmisi	67.928.000,00
2. 1. 1. 1. 13	Tunjangan Badan Anggaran	39.445.600.00
2. 1. 1. 1. 14	Tunjangan Badan Kehormatan	10.140.000.00
2. 1. 1. 1. 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	131.910.000,00
2. 1. 1. 1. 16	Tunjangan Perumahan	5.520.000.000.00
2. 1. 1. 1. 17	Uang Duka /Tewas	59.100.000.00
2. 1. 1. 1. 18	Uang Jasa Pengabdian	22.890.000.00
2. 1. 1. 1. 19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan OPRD	393.120.000,00
2. 1. 1. 1. 20	Tunjangan Kesehatan DPRD	56.070.000.00
2. 1. 1. 1. 21	Tunjangan Profesi Gum PNSD	379.631.707.000,00
2. 1. 1. 1. 22	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Keija	4.455.959.904,00
2. 1. 1. 2	Tambahan Penghasilan PNS	183.292.800.000.00
2. 1. 1. 2. 1	TPP berdasarkan beban keija	74.180.000.000.00
2. 1. 1. 2. 2	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	300.000.000,00
2. 1. 1. 2. 3	TPP pertimbangan obyektif berupa Penunjang Uang Makan	84.486.800.000,00
2. 1. 1. 2. 4	TPP berupa penunjang kebutuhan pegawai	18.400.000.000,00
2. 1. 1. 2. 5	Tambahan penghasilan gum PNSD	5.926.000.000,00
2. 1. 1. 3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	5.023.000.000.00
2. 1. 1. 3. 1	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000.00
2. 1. 1. 3. 2	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	1.243.000.000.00
2. 1. 1. 4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	32.832.699.943.00
2. 1. 1. 4. 1	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	32.832.699.943.00

2 1.1.5	Insentif pemungutan Retribusi Daerah	4.879.636.945,00
2.1.1.5.1	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.879.636.945,00
2.1.2	Belanja Hibah	127.135.630.000,00
2.1.2.1	Belanja Hibah Kepada Pemenntah	51.114.500.000,00
2.1.2.1.1	Hibah kepada Polres Sidoarjo	6.414.500.000,00
2.1.2.1.2	Hibah kepada Kodim 0816 Sidoarjo	700.000.000,00
2.1.2.1.3	Hibah kepada KPU	38.000.000.000,00
2.1.2.1.4	Hibah kepada Panwaslu	6.000.000.000,00
2.1.2.2	Belanja Hibah Kepada Masyarakat	60.706.130.000,00
2.1.2.2.1	Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian	6.930.000.000,00
2.1.2.2.2	Kelompok Masyarakat Btdang Pendidikan	42.331.130.000,00
2.1.2.2.3	Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan	2.495.000.000,00
2.1.2.2.4	Kelompok Masyarakat Bidang Kesenian	100.000.000,00
2.1.2.2.5	Kelompok Masyarakat Bidang Keolahragaan Non Profesional	8.850.000.000,00
2.1.2.3	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	15.315.000.000,00
2.1.2.3.1	Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	15.315.000.000,00
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	55.337.353.560,00
2.1.3.1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Indivtdu, Keluarga, dan/atau Masyarakat	9.417.070.000,00
2.1.3.1.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Indrvidu, Keluarga dan/atau Masyarakat	9.417.070.000,00
2.1.3.2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan	44.458.680.000,00
2.1.3.2.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan	44.458.680.000,00
2.1.3.3	Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan	1.461.603.560,00
2.1.3.3.1	Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan	1.461.603.560,00
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemenntah Desa	82.987.173.776,00
2.1.4.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	65.665.399.886,00
2.1.4.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	65.665.399.886,00
2.1.4.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	9.759.273.890,00
2.1.4.2.1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	9.759.273.890,00
2.1.4.3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemenntah Propinsi	7.562.500.000,00
2.1.4.3.1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemenntah Propinsi	7.562.500.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemenntah Desa dan Partai Politik	192.201.518.952,00
2.1.5.1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	191.050.448.757,00
2.1.5.1.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	189.885.248.757,00
2.1.5.1.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada RT/RW Kelurahan	1.165.200.000,00
2.1.5.2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.151.070.195,00
2.1.5.2.1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat	85.338.162,00
2.1.5.2.2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	310.977.948,00

2.1.5.2.3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Amanat Nasional (PAN)	140.771.105,00
2.1.5.2.4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PDI Perjuangan	179.137.595,00
2.1.5.2.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Golkar	80.350.813,00
2.1.5.2.6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	71.411.804,00
2.1.5.2.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerindra	162.189.102,00
2.1.5.2.8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Hanura	30.914.957,00
2.1.5.2.9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasdem	44.867.266,00
2.1.5.2.10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	20.044.943,00
2.1.5.2.11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Bulan Bintang	17.452.182,00
2.1.5.2.12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PKPI	7.614.318,00
2.1-6	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
2.1.6.1	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
2.1.6.1.1	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
2.2	Belanja Langsung	1.666.007.350.381,00
2-2-1	Belanja Pegawai	64.415.396.883,00
2.2.1.1	Honorarium PNS	39.422.398.032,00
2.2.1.1.1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.269.779.000,00
2.2.1.1.2	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.012.356.000,00
2.2.1.1.3	Honorarium Pengelola Keuangan	7.764.645.000,00
2.2-1.1-4	Belanja Pegawai BLUD	23.375.618.032,00
2.2.1.2	Honorarium Non PNS	12.508.409.650,00
2.2.1.2.1	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap (Kontrak data Base)	9.573.169.650,00
2.2.1.2.2	Honorarium Tim Pelaksana Tugas-tugas Khusus	2.935.240.000,00
2-2.1.3	Uang Lembur	3.110.149.601,00
2.2.1.3.1	Uang Lembur PNS	2.722.505.601,00
2.2.1.3.2	Uang Lembur Non PNS	146.824.000,00
2.2.1.3.3	Uang Makan Lembur	240.820.000,00
2.2.1.4	Belanja Pegawai Dana BOS	9.374.439.600,00
2.2.1.4.1	Belanja Pegawai Dana BOS	9.374.439.600,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	786.585.323.054,00
2.2.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis	58.721.568.326,00
2.2.2.1.1	Belanja alattulis kantor	8.653.102.518,00
2.2.2.1.2	Belanja dokumen/ administrasi tender	52.125.000,00
2.2.2.1.3	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.085.671.644,00
2.2.2.1.4	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	361.212.400,00
2.2.2.1.5	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.468.111.390,00
2.2.2.1.6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.784.272.806,00
2.2.2.1.7	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	57.860.000,00

2.2.2.1.8	Belanja pengisian tabung gas	68.995.000,00
2.2.2-1.9	Belanja obat-obatan	18.533.103.615,00
2.2.2-1.10	Belanja Laborat/Farmasi/Radiologi/Gigi	3.657.113.953,00
2-2.2.2	Belanja Bahan/Material	35.461.175.283,00
2.2.2.2.1	Belanja bahan baku bangunan	3.214.164.005,00
2.2.2.2.2	Belanja bahan/bibit tanaman	830.463.500,00
2.2.2.2.3	Belanja bibit temak	364.710.000,00
2.2.2.2.4	Belanja bahan obat-obatan	477.882.300,00
2.2.2-2.5	Belanja bahan kimia	526.385.000,00
2.2.2-2.6	Belanja bahan Penghargaan/hadiah	2.898.747.850,00
2.2.2.2.7	Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi	7.977.562.278,00
2.2.2.2.8	Belanja bahan perlengkapan pasien	460.099.400,00
2.2.2.2.9	Belanja bahan makanan temak	259.150.000,00
2.2.2.2.10	Belanja bahan makanan penunjang kesehatan masyarakat	51.501.000,00
2.2.2.2.11	Belanja bahan praktek sekolah	78.000.000,00
2.2.2.2.12	Belanja bahan perlengkapan perbengkelan	102.760.000,00
2.2.2.2.13	Belanja bahan perlengkapan/peralatan olah raga	70.203.000,00
2.2.2.2.14	Belanja bahan dekorasi gedung	218.614.000,00
2.2.2.2.15	Belanja bahan pelatihan/sosialisasi	13.121.681.550,00
2.2.2.2.16	Belanja bahan perlengkapan/peralatan perikanan	39.705.500,00
2.2.2-2.17	Belanja bahan pangan	1.166.170.000,00
2.2.2.2.18	Belanja bahan kebutuhan pokok	1.412.617.500,00
2.2.2.2.19	Belanja bahan peralatan dapur	137.972.000,00
2.2.2-2.20	Belanja bahan peralatan keamanan	99.225.000,00
2.2.2.2.21	Belanja bahan peralatan kedokteran	317.133.900,00
2.2.2-2.22	Belanja bahan perlengkapan/peralatan pertanian	365.220.000,00
2.2.2.2.23	Belanja bahan peralatan rumah tangga	263.795.000,00
2.2.2.2.24	Belanja bahan bacaan	20.300.000,00
2.2.2.2.25	Belanja bahan peralatan peraga edukatif	348.435.500,00
2.2.2.2.26	Belanja bahan makanan dan minuman pasien	638.677.000,00
2-2.2.3	Belanja Jasa Kantor	128.719.663.926,00
2.2.2.3.1	Belanja telepon	1.919.375.000,00
2.2.2-3.2	Belanja air	964.955.000,00
2.2.2.3.3	Belanja listrik	48.097.874.440,00
2.2.2.3.4	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	115.000.000,00
2.2.2.3.5	Belanja surat kabar/majalah	549.008.000,00
2.2.2.3.6	Belanja kawat/faksimti/intemet/Jasa Ijin Frekwensi dan sarana Penunjang	2.901.805.940,00
2.2.2.3.7	Belanja paket/pengiriman	53.350.000,00

2 . 2 . 2 . 3 . 8	Belanja Sertifikasi	1.390.800.000,00
2 . 2 . 2 . 3 . 9	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	112.585.000,00
2.2.2. 3.10	Belanja luran kepada Forum - Forum	76.580.000,00
2.2.2. 3.11	Belanja jasa pemerfksaan sampel/ laboratorium	1.758.835.076,00
2.2.2. 3.12	Belanja jasa Pelayanan	395.400.000,00
2.2.2. 3.13	Belanja Jasa/Tenaga Kebersihan kantor	3.597.807.400,00
2.2.2. 3.14	Belanja Jasa/Tenaga Keamanan/Penjaga Kantor	4.903.290.800,00
2.2.2. 3.15	Belanja Jasa/Tenaga Penjaga Busem	661.600.000,00
2.2.2. 3.16	Belanja jasa /Tenaga kerja pengeioloan pertanian dan perikanan	649.670.000,00
2.2.2. 3.17	Belanja jasa /Tenaga kerja membantu pengelola KB Desa	3.462.756.000,00
2.2.2. 3.18	Belanja Jasa/Tenaga Administrasi Perkantoran	2.752.648.600,00
2.2.2. 3.19	Belanja Jasa/Tenaga Pengelola Raskin	545.306.200,00
2 . 2 . 2 . 3.20	Belanja Jasa/Tenaga Juru Parkir	6.634.800.000,00
2.2.2. 3.21	Belanja Jasa/Tenaga Penjaga Perlintasan KA	580.800.000,00
2.2.2. 3.22	Belanja Jasa/Tenaga Teknis	2.335.649.200,00
2.2.2. 3.23	Belanja Jasa/Tenaga Sosial	770.940.000,00
2.2.2. 3.24	Belanja Jasa/Tenaga Pekerja Kasar	4.217.210.000,00
2.2.2. 3.25	Belanja Jasa/Tenaga Pengelola Rusunawa	841.755.600,00
2.2.2. 3.26	Belanja Jasa/Tenaga Kader Kesehatan	1.202.495.000,00
2.2.2. 3.27	Belanja Jasa/Tenaga Penyapu Jalan	4.309.200.000,00
2.2.2. 3.28	Belanja Jasa/Tenaga Pertamanan	1.890.000.000,00
2 . 2 . 2 . 3.29	Belanja Jasa/Tenaga Sopir Truk/Alat Berat	211.024.000,00
2 . 2 . 2 . 3.30	Belanja Retribusi	23.364.620,00
2 . 2 . 2 . 3.31	Belanja Jasa Angkut Barang	30.277.000,00
2 . 2 . 2 . 3.32	Belanja Jasa/Tenaga Pemadam Kebakaran	1.504.800.000,00
2.2.2. 3.33	Belanja Jasa/Tenaga Pengendali Keamanan Lingkungan	3.239.800.000,00
2.2.2. 3.34	Belanja Jasa/Tenaga Pengatur Lalu Lintas	360.000.000,00
2.2.2. 3.35	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	25.313.655.350,00
2.2.2. 3.36	Belanja Jasa/Tenaga Pengolah Arsip	205.500.000,00
2.2.2. 3.37	Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis	133.045.700,00
2 . 2 . 2 . 3.38	Belanja Jasa Laundry	1.500.000,00
2.2.2. 3.39	Belanja Pendaftaran Perkara	5.200.000,00
2 . 2 . 2 . 4	Belanja Premi Asuransi	983.000.000,00
2 . 2 . 2 . 4 . 1	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	808.000.000,00
2 . 2 . 2 . 4 . 2	Belanja Premi Asuransi Parkir Berlangganan	175.000.000,00
2.2.2.5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.386.295.341,00
2.2.2.5. 1	Belanja Jasa Service	3.074.699.120,00
2 . 2 . 2 . 5 . 2	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.455.760.221,00

2.2.2.5.3	Belanja Bahan pelumas	835.932.000,00
2.2.2.5.4	Belanja Jasa KIR	34.500.000,00
2.2.2.5.5	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	985.404.000,00
2.2.2.6	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.504.246.910,00
2.2.2.6.1	Belanja cetak	18.493.998.310,00
2.2.2.6.2	Belanja Penggandaan	4.010.248.600,00
2.2.2.7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.709.873.000,00
2.2.2.7.1	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.295.150.000,00
2.2.2.7.2	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	414.723.000,00
2.2.2.8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	924.400.000,00
2.2.2.8.1	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	911.400.000,00
2.2.2.8.2	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	13.000.000,00
2.2.2.9	Belanja Sewa Alat Berat	155.000.000,00
2.2.2.9.1	Belanja sewa Eskavator	80.000.000,00
2.2.2.9.2	Belanja sewa Buldoser	75.000.000,00
2.2.2.10	Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor	5.119.562.900,00
2.2.2.10.1	Belanja sewa meja kursi	630.824.000,00
2.2.2.10.2	Belanja sewa komputer dan printer	75.000.000,00
2.2.2.10.3	Belanja sewa proyektor	27.750.000,00
2.2.2.10.4	Belanja sewa generator	106.175.000,00
2.2.2.10.5	Belanja sewa tenda	606.421.900,00
2.2.2.10.6	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	287.800.000,00
2.2.2.10.7	Belanja sewa Sound System	633.935.000,00
2.2.2.10.8	Belanja sewa Tanaman Hias	34.000.000,00
2.2.2.10.9	Belanja sewa alat musik	123.552.000,00
2.2.2.10.10	Belanja sewa dekorasi	675.125.000,00
2.2.2.10.11	Belanja sewa stand pameran	1.444.730.000,00
2.2.2.10.12	Belanja sewa peralatan pelatihan	229.250.000,00
2.2.2.10.13	Belanja sewa server	245.000.000,00
2.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	40.997.977.921,00
2.2.2.11.1	Belanja makanan dan minuman rapat	28.188.402.000,00
2.2.2.11.2	Belanja makanan dan minuman tamu	1.941.448.421,00
2.2.2.11.3	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	864.363.600,00
2.2.2.11.4	Belanja Rumah Tangga KDH/WKDH	330.000.000,00
2.2.2.11.5	Belanja makanan dan minuman petugas khusus	205.505.560,00
2.2.2.11.6	Belanja makanan dan minuman tambahan anak sekolah	265.000.000,00
2.2.2.11.7	Belanja makanan dan minuman tambahan penderita kurang gizi	5.218.661.440,00
2.2.2.11.8	Belanja makanan dan minuman tambahan penderita terpapar penyakit	180.131.400,00

2.2. 2.11. 9	Belanja makanan dan minuman tambahan posyandu balita dan usila	1.161.000.000,00
2.2. 2.11.10	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.643.465.500,00
2 . 2. 2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	879.235.000,00
2.2. 2.12. 1	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	73.800.000,00
2.2. 2.12. 2	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	206.000.000,00
2.2. 2.12. 3	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	163.000.000,00
2.2. 2.12. 4	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	321.135.000,00
2.2. 2.12. 5	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	115.300.000,00
2.2. 2.13	Belanja Pakaian Keija/Periengkapan Keija Lapangan	1.446.825.000,00
2.2. 2.13. 1	Belanja pakaian keija lapangan	1.090.735.000,00
2.2. 2.13. 2	Belanja sepatu ketja lapangan	213.950.000,00
2.2. 2.13. 3	Belanja Ransel/tas	52.400.000,00
2.2. 2.13. 4	Belanja kelengkapan pakaian keija.	89.740.000,00
2.2. 2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	2.264.275.000,00
2.2. 2.14. 1	Belanja pakaian adat daerah	81.450.000,00
2.2. 2.14. 2	Belanja pakaian batik tradisional	713.225.000,00
2.2. 2.14. 3	Belanja pakaian olahraga	1.469.600.000,00
2.2. 2.15	Belanja Peijalanan Dinas	71.185.636.262,00
2.2. 2.15. 1	Belanja peijalanan dinas dalam daerah	14.285.984.090,00
2.2. 2.15. 2	Belanja peijalanan dinas luar daerah	38.472.647.172,00
2.2. 2.15. 3	Belanja peijalanan dinas luar negeri	1.325.000.000,00
2.2. 2.15. 4	Belanja Bantuan Transport/Uang Saku	16.851.005.000,00
2.2. 2.15. 5	Belanja pengiriman Tim Petugas Haji Daerah (TPHD)	251.000.000,00
2.2. 2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	367.400.000,00
2.2. 2.16. 1	Belanja biasiswa belajar SI	367.400.000,00
2.2. 2.17	Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi dan bimbingan teknis	10.217.902.730,00
2.2. 2.17. 1	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	921.822.500,00
2.2. 2.17. 2	Belanja Sosialisasi	1.067.250.000,00
2.2. 2.17. 3	Belanja Bimbingan Teknis	470.600.000,00
2.2. 2.17. 4	Belanja Pengiriman Pelatihan/Bimbingan Teknis	7.758.230.230,00
2.2. 2.18	Belanja Pemeliharaan	86.149.064.400,00
2.2. 2.18. 1	Belanja Pemeliharaan Jalan	10.558.900.000,00
2.2. 2.18. 2	Belanja Pemeliharaan Jembatan	9.257.950.000,00
2.2. 2.18. 3	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan saluran Drainase	31.060.689.000,00
2.2. 2.18. 4	Belanja Pemeliharaan Gedung Puskesmas	1.765.713.000,00
2.2. 2.18. 5	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah	1.185.074.000,00
2.2. 2.18. 6	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	8.870.738.200,00
2.2. 2.18. 7	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Jabatan	1.714.525.000,00

2.2. 2.18. 8	Belanja Pemeliharaan Gedung Gudang	246.000.000,00
2.2. 2.18. 9	Belanja Pemeliharaan Rumah Pompa/Pompa Busem	639.820.000,00
2.2. 2.18.10	Belanja Pemeliharaan Gedung Rusunawa	15.000.000,00
2.2. 2.18.11	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1.729.993.000,00
2.2. 2.18.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.287.590.680,00
2.2. 2.18.13	Belanja Pemeliharaan Meubelair	328.680.000,00
2.2. 2.18.14	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat (Traktor, buldozer, stoom wales, eskavator)	300.000.000,00
2.2. 2.18.15	Belanja Pemeliharaan Alat-alat generator/ genset	142.000.000,00
2.2. 2.18.16	Belanja Pemeliharaan Alat alat Kedokteran	20.520.000,00
2.2. 2.18.17	Belanja Pemeliharaan Alat alat Kesehatan	353.684.000,00
2.2. 2.18.18	Belanja Pemeliharaan Tanaman / Taman	1.624.400.000,00
2.2. 2.18.19	Belanja pemeliharaan Incenator/TPS	11.835.000,00
2. 2. 2.18.20	Belanja Pemeliharaan sarana prasarana Olaha Raga.	1.526.000.000,00
2.2. 2.18.21	Belanja Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik	883.324.900,00
2.2. 2.18.22	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (traffic light, rambu-rambu lalu lintas)	1.058.579.900,00
2.2. 2.18.23	Belanja Pemeliharaan Pasar	1.219.400.000,00
2.2. 2.18.24	Belanja Pemeliharaan Saluran Pembuangan	6.477.887.020,00
2.2. 2.18.25	Belanja Pemeliharaan Instalasi air bersihSair minum	47.000.000,00
2. 2. 2.18.26	Belanja Pemeliharaan alat-alat laboratorium	123.160.000,00
2. 2. 2.18.27	Belanja Pemeliharaan Tower	189.000.000,00
2. 2. 2.18.28	Belanja Pemeliharaan Jaringan komputer/wave LAN/internet	615.500.700,00
2.2. 2.18.29	Belanja Pemeliharaan software	790.250.000,00
2.2. 2.18.30	Belanja Pemeliharaan alat pemadam kebakaran	500.000,00
2.2. 2.18.31	Belanja Pemeliharaan Arsip/Bahan Pustaka	13.000.000,00
2.2. 2.18.32	Belanja Pemeliharaan Dermaga	92.350.000,00
2 - 2. 2.19	Belanja Jasa Konsultansi	30.500.791.642,00
2.2. 2.19. 1	Belanja jasa Konsultansi Penelitian	2.559.650.000,00
2.2. 2.19. 2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.951.088.050,00
2.2. 2.19. 3	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.300.519.850,00
2.2. 2.19. 4	Belanja Jasa Konsultansi/Pendampingan	13.689.533.742,00
2-2. 2.20	Belanja Barang Dana Bos	18.400.164.600,00
2.2. 2.20. 1	Belanja Barang Dana Bos	18.400.164.600,00
22. 2.21	Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.518.945.000,00
2.2. 2.21. 1	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	7.228.945.000,00
2.2. 2.21. 2	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	1.290.000.000,00
2.2. 2.22	Belanja Barang yang akan dijual kepada masyarakat/Pihak Ketiga	4.420.500.000,00
2.2. 2.22. 1	Belanja Barang yang akan dijual kepada masyarakat	4.420.500.000,00
2.2. 2.23	Belanja Jasa Pemeriksaan Kesehatan	20.000.000,00

2.2.2.23.1	Belanja jasa pemeriksaan / Check Up Kesehatan	20.000.000,00
2.2.2.24	Belanja Penyedia Jasa	7.346.225.000,00
2.2.2.24.1	Belanja jasa penyedia tenaga kerja	3.149.475.000,00
2.2.2.24.2	Belanja jasa bongkar reklame	100.000.000,00
2.2.2.24.3	Belanja penyedia jasa kebersihan (cleaning service)	3.234.250.000,00
2.2.2.24.4	Belanja penyedia jasa keamanan kantor	389.700.000,00
2.2.2.24.5	Belanja jasa pertunjukan kesenian	472.800.000,00
2.2.2.25	Belanja barang dan jasa BLUD	190.004.162.113,00
2.2.2.25.1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	190.004.162.113,00
2.2.2.26	Belanja Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin	20.722.560.000,00
2.2.2.26.1	Belanja Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	20.722.560.000,00
2.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	23.178.212.700,00
2.2.2.27.1	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	8.410.430.000,00
2.2.2.27.2	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	14.767.782.700,00
2.2.2.28	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.565.810.000,00
2.2.2.28.1	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	1.565.810.000,00
2.2.2.29	Belanja Khusus Pengawasan	4.714.850.000,00
2.2.2.29.1	Uang Saku Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala	2.824.650.000,00
2.2.2.29.2	Uang Saku Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah	672.600.000,00
2.2.2.29.3	Uang Saku Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Temuan	437.000.000,00
2.2.2.29.4	Uang Saku Pelaksanaan Pemantauan Disiplin Aparatur	780.600.000,00
2.2.3	Belanja Modal	815.006.630.444,00
2.2.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	37.946.000.000,00
2.2.3.1.1	Belanja modal Pengadaan tanah kantor	11.941.000.000,00
2.2.3.1.2	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar	205.000.000,00
2.2.3.1.3	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus	7.800.000.000,00
2.2.3.1.4	Belanja modal Pengadaan Tanah sarana umum pelebaran jalan	18.000.000.000,00
2.2.3.2	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	1.641.400.948,00
2.2.3.2.1	Belanja modal Pengadaan eskavator	1.000.000.000,00
2.2.3.2.2	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Sampan	151.500.000,00
2.2.3.2.3	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset	489.900.948,00
2.2.3.3	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	12.210.453.124,00
2.2.3.3.1	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck	4.798.650.000,00
2.2.3.3.2	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks	331.482.000,00
2.2.3.3.3	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	769.371.024,00
2.2.3.3.4	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	2.097.350.100,00
2.2.3.3.5	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran	4.007.200.000,00
2.2.3.3.6.1	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	206.400.000,00

2.2.3.4	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	924.900.000,00
2.2.3.4.1	Belanja modal Pengadaan gerobak	463.300.000,00
2.2.3.4.2	Belanja Modal Pengadaan Kontainer	399.200.000,00
2.2.3.4.3	Belanja Modal Pengadaan Troli/Brankard	62.400.000,00
2.2.3.5	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	128.000.000,00
2.2.3.5.1	Belanja modal Pengadaan motor boat/motor tempel	128.000.000,00
2-2.3.6	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	55.000.000,00
2.2.3.6.1	Belanja modal Pengadaan perahu karet	55.000.000,00
2.2.3.7	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	64.315.000,00
2.2.3.7.1	Belanja modal Pengadaan mesin kornpresor	7.500.000,00
2.2.3.7.2	Belanja modal Pengadaan mesin gerinda	2.300.000,00
2.2.3.7.3	Belanja modal Pengadaan mesin bor	5.500.000,00
2.2.3.7.4	Belanja modal Pengadaan peralatan perbengkelan	49.015.000,00
2.2.3.8	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Peitanian dan Petemakan	789.100.000,00
2.2.3.8.1	Belanja modal pengadaan alat penyemprot hama	96.900.000,00
2.2.3.8.2	Belanja modal pengadaan peralatan pemotongan hewan	692.200.000,00
2.2.3.9	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.705.533.600,00
2.2.3.9.1	Belanja modal Pengadaan mesin tik	59.817.500,00
2.2.3.9.2	Belanja modal Pengadaan mesin hitung	16.000.000,00
2.2.3.9.3	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	233.184.200,00
2.2.3.9.4	Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas	3.712.500,00
2.2.3.9.5	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	210.151.600,00
2.2.3.9.6	Belanja modal pengadaan pendingin ruangan	2.181.518.200,00
2.2.3.9.7	Belanja modal pengadaan vacuum cleaner	48.250.000,00
2.2.3.9.8	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	59.000.000,00
2.2.3.9.9	Belanja modal pengadaan mesin potong rumput/Kayu	146.660.000,00
2.2.3.9.10	Belanja modal pengadaan mesin pompa air	1.059.049.600,00
2.2.3.9.11	Belanja modal pengadaan mesin absensi	139.075.000,00
2.2.3.9.12	Belanja modal pengadaan tandon air	114.125.000,00
2.2.3.9.13	Belanja modal pengadaan mesin penghancur jarum	24.275.000,00
2.2.3.9.14	Belanja modal pengadaan water heater	20.925.000,00
2.2.3.9.15	Belanja modal pengadaan mesin laminating	3.000.000,00
2.2.3.9.16	Belanja modal pengadaan mesin antrian	137.540.000,00
2.2.3.9.17	Belanja modal pengadaan perekam	101.700.000,00
2.2.3.9.18	Belanja modal pengadaan card reader	1.200.000,00
2.2.3.9.19	Belanja modal pengadaan barcode reader	146.350.000,00
2.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.978.610.570,00
2.2.3.10.1	Belanja modal Pengadaan meja gambar	1.200.000,00

2.2. 3.10. 2	Belanja modal Pengadaan almari	2.162.115.000,00
2.2. 3.10. 3	Belanja modal Pengadaan brankas	87.500.000,00
2.2. 3.10. 4	Belanja modal Pengadaan filling kablnet	213.594.900,00
2.2. 3.10. 5	Belanja modal Pengadaan white board	247.900.000,00
2.2. 3.10. 6	Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu	3.000.000,00
2.2. 3.10. 7	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	666.850.000,00
2.2. 3.10. 8	Belanja modal pengadaan papan Instansi	332.267.480,00
2.2. 3.10. 9	Belanja modal pengadaan TV/Radio/Tape	668.386.740,00
2.2. 3.10.10	Belanja modal pengadaan mesin cud	30.187.600,00
2.2. 3.10.11	Belanja modal pengadaan tangga	43.130.000,00
2.2. 3.10.12	Belanja modal pengadaan billboard	1.003.000.000,00
2.2. 3.10.13	Belanja modal pengadaan tempat sampah	238.255.000,00
2.2. 3.10.14	Belanja modal pengadaan tenda (bivak)	273.200.000,00
2.2. 3.10.15	Belanja modal pengadaan korden/karpet	998.023.850,00
2.2. 3.10.16	Belanja modal pengadaan podium	10.000.000,00
2.2. 3.11	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.087.377.796,00
2.2. 3.11. 1	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	1.645.777.100,00
2.2. 3.11. 2	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	2.571.000.000,00
2.2. 3.11. 3	Belanja modal Pengadaan komputer note book	2.174.358.000,00
2.2. 3.11. 4	Belanja modal Pengadaan printer	2.417.780.125,00
2.2. 3.11. 5	Belanja modal Pengadaan scanner	129.024.000,00
2.2. 3.11. 6	Belanja modal Pengadaan monitor/display	91.600.000,00
2.2. 3.11. 7	Belanja modal Pengadaan CPU	15.000.000,00
2.2. 3.11. 8	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	185.883.880,00
2.2. 3.11. 9	Belanja modal pengadaan peralatan dan jaringan komputer	1.150.185.691,00
2.2. 3.11.10	Belanja modal pengadaan software	3.706.769.000,00
2-2. 3.12	Belanja Modal Pengadaan Meubeuteur	7.300.528.800,00
2.2. 3.12. 1	Belanja modal Pengadaan meja keija	771.920.800,00
2.2. 3.12. 2	Belanja modal Pengadaan meja rapat	870.675.000,00
2.2. 3.12. 3	Belanja modal Pengadaan meja makan	79.250.000,00
2.2. 3.12. 4	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	618.684.300,00
2.2. 3.12. 5	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	1.045.992.000,00
2.2. 3.12. 6	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	1.289.915.200,00
2.2. 3.12. 7	Belanja modal Pengadaan sofa	228.125.000,00
2.2. 3.12. 8	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	721.625.000,00
2.2. 3.12. 9	Belanja modal Pengadaan Meja Komputer	38.728.500,00
2.2. 3.12.10	Belanja modal Pengadaan meja kursi siswa	1.176.150.000,00
2.2. 3.12.11	Belanja modal Pengadaan meja kursi tamu	102.850.000,00

2 . 2 . 3.12.12	Belanja modal Pengadaan kursi tungg	188.200.000,00
2.2. 3.12.13	Belanja modal Pengadaan Furniture ruang pelayanan	87.663.000,00
2.2. 3.12.14	Belanja modal Pengadaan Meja Pelayanan	80.750.000,00
2.2. 3.13	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	479.572.600,00
2.2. 3.13. 1	Belanja modal Pengadaan tabung gas	33.725.000,00
2.2. 3.13. 2	Belanja modal Pengadaan kompor gas	17.004.800,00
2.2. 3.13. 3	Belanja modal Pengadaan lemari makan	30.000.000,00
2.2. 3.13. 4	Belanja modal Pengadaan dispenser	99.955.000,00
2.2. 3.13. 5	Belanja modal Pengadaan kulkas	250.792.500,00
2.2. 3.13. 6	Belanja modal Pengadaan rak piring	1.800.000,00
2.2. 3.13. 7	Belanja Modal Blender/Setrika/Rice Cooker	21.295.300,00
2.2. 3.13. 8	Belanja Modal Panci/Dandang/Penggorengan	25.000.000,00
2.2. 3.14	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	133.955.900,00
2.2. 3.14. 1	Belanja modal Pengadaan lampu hias	44.800.000,00
2.2. 3.14. 2	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja	13.405.900,00
2.2. 3.14. 3	Belanja modal Pengadaan kaca cermin	6.500.000,00
2.2. 3.14. 4	Belanja modal Pengadaan penyekat ruang	53.750.000,00
2.2. 3.14. 5	Belanja modal Pengadaan akuarium	15.500.000,00
2 . 2 . 3.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.582.765.848,00
2.2. 3.15. 1	Belanja modal Pengadaan kamera	664.800.000,00
2.2. 3.15. 2	Belanja modal Pengadaan handycam	241.150.000,00
2.2. 3.15. 3	Belanja modal Pengadaan proyektor	480.696.500,00
2.2. 3.15. 4	Belanja modal Pengadaan Audio Video	835.453.998,00
2.2. 3.15. 5	Belanja modal Pengadaan pertengkapan Audio Video	360.665.350,00
2.2. 3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	564.561.700,00
2.2. 3.16. 1	Belanja modal Pengadaan telepon	42.550.000,00
2.2. 3.16. 2	Belanja modal Pengadaan faximili	16.136.700,00
2.2. 3.16. 3	Belanja modal Pengadaan radio SSB	15.300.000,00
2.2. 3.16. 4	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	244.850.000,00
2.2. 3.16. 5	Belanja modal Pengadaan radio VHF	201.350.000,00
2.2. 3.16. 6	Belanja modal Pengadaan radio UHF	41.375.000,00
2.2. 3.16. 7	Belanja modal Pengadaan interkom	3.000.000,00
2-2. 3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	513.671.600,00
2.2. 3.17. 1	Belanja modal Pengadaan ttimbangan	141.321.600,00
2.2. 3.17. 2	Belanja modal Pengadaan alat GPS	64.500.000,00
2.2. 3.17. 3	Belanja Modal Alat Ukur Meteran Glinding	42.450.000,00
2.2. 3.17. 4	Belanja modal Pengadaan alat ukur meteran air	48.400.000,00
2.2. 3.17. 5	Belanja modal Pengadaan alat ukur kesehatan	214.500.000,00

2.2. 3.17. 6	Belanja modal Pengadaan alat ukur curah hujan	2.500.000,00
2-2. 3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	9.631.653.380,00
2.2. 3.18. 1	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	6.307.868.980,00
2.2. 3.18. 2	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi	1.192.455.200,00
2.2. 3.18. 3	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT	32.000.000,00
2.2. 3.18. 4	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak	44.750.000,00
2.2. 3.18. 5	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyak'rt kandungan	1.097.420.000,00
2.2. 3.18. 6	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan	15.000.000,00
2.2. 3.18. 7	Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi	10.000.000,00
2.2. 3.18. 8	Belanja modal Pengadaan alat-alat penyakit dalam/intemis	441.800.000,00
2.2. 3.18. 9	Belanja modal Pengadaan periengkapan pasien	34.902.000,00
2.2. 3.18.10	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran Lab PK	455.457.200,00
2.2. 3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	15.748.954.405,00
2.2. 3.19. 1	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi	35.000.000,00
2.2. 3.19. 2	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	4.823.649.660,00
2.2. 3.19. 3	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium pertanian	9.500.000,00
2.2. 3.19. 4	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peternakan	39.463.660,00
2.2. 3.19. 5	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan	14.575.000,00
2.2. 3.19. 6	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa	4.375.000.000,00
2.2. 3.19. 7	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	6.219.016.085,00
2.2. 3.19. 8	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium lingkungan	232.750.000,00
2.2. 3.20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	165.339.650.000,00
2.2. 3.20. 1	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	153.193.650.000,00
2.2. 3.20. 2	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan produksi tambak	12.146.000.000,00
2.2. 3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	20.731.850.000,00
2.2. 3.21. 1	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	20.731.850.000,00
2.2. 3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	149.863.027.959,00
2.2. 3.22. 1	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	125.964.246.119,00
2.2. 3.22. 2	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	5.066.410.340,00
2.2. 3.22. 3	Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air	1.465.000.000,00
2.2. 3.22. 4	Belanja modal Pengadaan konstruksi deimaga	490.140.000,00
2.2. 3.22. 5	Belanja modal Pengadaan konstruksi sumur / HkJran	713.376.500,00
2.2. 3.22. 6	Belanja modal Pengadaan konstruksi saluran pembuangan	7.238.055.000,00
2.2. 3.22. 7	Belanja modal pengadaan plengsengan	8.925.800.000,00
2-2. 3.23	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota	35.393.985.000,00
2.2. 3.23. 1	Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan	900.900.000,00
2.2. 3.23. 2	Belanja modal Pengadaan periengkapan jalan (traffic light rambu-rambu lalu lintas)	1.744.200.000,00
2. 2 . 3.23. 3	Belanja modal Pengadaan Taman	5.616.325.000,00

2.2. 3.23. 4	Belanja modal Pengadaan lampu penerangan jalan umum	27.132.560.000,00
2 . 2 . 3.24	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1.651.480.000,00
2.2. 3.24. 1	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	1.251.980.000,00
2.2. 3.24. 2	Belanja modal Pengadaan instalasi telepon	87.750.000,00
2.2. 3.24. 3	Belanja modal Pengadaan jaringan internet	50.000.000,00
2 . 2 . 3.24. 4	Belanja modal pengadaan instalasi air	261.750.000,00
2 . 2 . 3.25	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	159.831.134.139,00
2.2. 3.25. 1	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	40.026.705.659,00
2.2. 3.25. 2	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan	388.000.000,00
2.2. 3.25. 3	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	423.250.000,00
2.2. 3.25. 4	Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan	244.641.200,00
2.2. 3.25. 5	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung Puskesmas	11.328.644.690,00
2.2. 3.25. 6	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung Sekolah	50.281.038.465,00
2.2. 3.25. 7	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung pasar	959.043.860,00
2.2. 3.25. 8	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung perumahan	251.350.000,00
2 . 2 . 3.25. 9	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung pengolahan sampah	9.675.000.000,00
2.2. 3.25.t0	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung pengolahan limbah	330.000.000,00
2.2. 3.25.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi tempat pemakaman umum	238.050.000,00
2.2. 3.25.12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /pembelian Gedung serba guna	43.997.356.660,00
2.2. 3.25.13	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Halte/Shelter	1.688.053.605,00
2.2. 3.26	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	29.677.292.680,00
2 . 2 . 3.26. 1	Belanja modal Pengadaan buku keagamaan	49.750.000,00
2.2. 3.26. 2	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	203.850.000,00
2.2. 3.26. 3	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	50.225.000,00
2.2. 3.26. 4	Belanja modal Pengadaan terbitan berkala (jumlah Compact Disk)	41.000.000,00
2.2. 3.26. 5	Belanja modal Pengadaan peta/atlas/globe	6.000.000,00
2.2. 3.26. 6	Belanja modal pengadaan buku bacaan perpustakaan	29.326.467.680,00
2.2. 3.27	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	158.250.000,00
2.2. 3.27. 1	Belanja modal Pengadaan lukisan/foto	58.000.000,00
2.2. 3.27. 2	Belanja modal Pengadaan alat-alat musik	100.250.000,00
2.2. 3.28	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Temak dan Tanaman	2.386.798.000,00
2.2. 3.28. 1	Belanja modal Pengadaan tanaman	2.386.798.000,00
2-2. 3.29	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peralatan/Keamanan	9.000.000,00
2.2. 3.29. 1	Belanja Modal Pengadaan Teropong	9.000.000,00
2-2. 3.30	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	9.976.275.000,00
2.2. 3.J0. 1	Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana olah raga	9.976.275.000,00
2. 2. 3.31	Belanja Modal BLUD	99.974.381.595,00
2.2. 3.31. 1	Belanja Modal BLUD	99.974.381.595,00

2.2.3.32.1	Belanja Modal Dana Bos	9.792.100.800,00
2.2.3.33	Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembelajaran Sekolah	13.735.050.000,00
2.2.3.33.1	Alat Peraga dan Sarana Penunjang Pembelajaran/Ajat Elektronik	11.127.550.000,00
2.2.3.33.2	Sarana TIK Penunjang perpustakaan eletronik, dan Multimedia intraktif pembelajaran	2.418.450.000,00
2.2.3.33.3	Belanja Meubeuleur Perabot Ruang Kelas	189.050.000,00
	Jumlah BELANJA	3.690.881.215.675,00
	Surplus/(Defisit)	(328.486.254.303,00)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	328.486.254.303,00
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	340.386.254.303,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	328.486.254.303,00
3.1.1.1	Pelampauan Penerimaan PAD	21.000.000.000,00
3.1.1.1.1	Retribusi Daerah	500.000.000,00
3.1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	500.000.000,00
3.1.1.1.3	Lain-lain PAD yang sah	20.000.000.000,00
3-1.1.2	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	2.000.000.000,00
3.1.1.2.1	Bagi Hasil Pajak	500.000.000,00
3.1.3.2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumberdaya alam	1.500.000.000,00
3-1.1.3	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.400.000.000,00
3.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	1.600.000.000,00
3.1.1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	4.000.000.000,00
3.1.1.4.	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	307.886.254.303,00
3.1.1.4.1	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	60.000.000.000,00
3.1.1.4.2	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	1.000.000.000,00
3.1.1.4.3	Belanja Barang dan Jasa	25.481.254.303,00
3.1.1.4.4	Belanja Modal	210.405.000.000,00
3.1.1.4.5	Belanja Hibah	3.000.000.000,00
3.1.1.4.6	Belanja Bantuan Sosial	3.000.000.000,00
3.1.1.4.7	Belanja Bagi Hasil	1.500.000.000,00
3.1.1.4.8	Belanja Bantuan Keuangan	500.000.000,00
3.1.1.4.9	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
3.1.2	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	11.900.000.000,00
3-1.2.1.	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	11.900.000.000,00
3.1.2.1.1	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir dari KUKM	7.700.000.000,00
3.1.2.1.2	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir dari Pembelian Gabah Petani	3.600.000.000,00
3.1.2.1.3	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	300.000.000,00

3.1.2.1.4	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir dari Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL)	300.000.000,00
	JumlahPenerimaan Pembiayaan Daerah	348.386.254.303,00
3 . 2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	11.900.000.000,00
3-2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.900.000.000,00
3.2.1.1	Badan Usaha Swasta	11.900.000.000,00
3.2.1.1.1	Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	7.700.000.000,00
3.2.1.1.2	Pembelian Gabah Petani	3.600.000.000,00
3.2.1.1.3	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	300.000.000,00
3.2.1.1.4	Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL)	300.000.000,00
	JumlahPengeluaran Pembiayaan daerah	11.900.000.000,00
	Pembiayaan Netto	328.486.284.303,00

SIDOARJO, 22 Desember 2014
BUPATI SIDOARJO

ttd

H. SAIFUL ILAH

